

Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia-Vietnam: Aspek Ekonomi, Strategis dan Keamanan*

Asnani USMAN

Perundingan penetapan batas landas kontinen ke-7 antara Indonesia dan Vietnam yang telah diadakan pada tanggal 3-9 November 1984 di Hanoi masih belum mencapai persetujuan bersama. Perundingan yang dimulai sejak tahun 1978 ini belum menemukan kata sepakat yang dapat diterima kedua pihak tampaknya karena adanya perbedaan prinsip dalam penentuan batas tersebut.

Tercapainya persetujuan batas landas kontinen ini sangat penting bagi Indonesia demi kesatuan wilayah yang menyangkut kepentingan ekonomi, strategis dan keamanan. Sedang bagi Vietnam, hal ini dapat mempunyai pengaruh positif atas citranva di kawasan Asia Tenggara.

PERMASALAHAN DAN PERKEMBANGAN PERUNDINGAN

Sejak Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 tentang Landas Kontinen, Indonesia telah mengadakan perjanjian garis batas wilayah perairan dan landas kontinen dengan negara-negara tetangganya, yaitu Malaysia, Muangthai, Australia (kecuali Timor gap), India, Singapura, dan Papua Nugini. Berbeda dengan perjanjian-perjanjian ini yang telah dapat diselesaikan dengan baik oleh Indonesia, dengan Vietnam telah timbul rintangan yang berupa perbedaan prinsip mengenai penentuan batas landas kontinen kedua negara.

Perbedaan prinsip ini telah timbul sejak pemerintahan Vietnam Selatan yang berdasarkan Dekrit 1971 mengajukan tuntutan landas kontinennya di

*Karangan ini pernah dimuat di *Suara Karya*, 18 Desember 1984. Asnani Usman adalah staf CSIS.

bagian selatan yang berbatasan dengan landas kontinen Indonesia di bagian utara Pulau Natuna. Tuntutan tersebut menyebabkan terjadinya wilayah tumpang-tindih dengan batas yang ditentukan oleh Indonesia. Sebabnya adalah bahwa Pemerintah Vietnam Selatan menarik garis batas "sama jarak" (equidistant line) antara Pantai Vietnam Selatan dan Pulau Kalimantan tanpa memperhatikan Pulau Natuna sebagai wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan prinsip Negara Kepulauan Indonesia menetapkan pengukuran garis batas dari pulau-pulau terluar, yaitu Pulau Natuna. Garis batas yang berlaku ialah garis tengah. Jatuhnya Vietnam Selatan ke tangan komunis dan terbentuknya Republik Sosialis Vietnam telah menimbulkan persoalan baru bagi Indonesia.

Penetapan batas landas kontinen Indonesia dengan Vietnam (Republik Sosialis Vietnam) kembali menimbulkan persoalan perbedaan prinsip. Vietnam menuntut bahwa suatu "trench" (parit laut) yang membentang dari Pulau Anambas sampai Pulau Natuna adalah batas landas kontinennya. Sistem ini kemudian disebutnya sebagai sistem garis batas "thalweg." Sistem ini biasanya dipakai bagi negara yang dibatasi sungai, yaitu penggunaan alur-alur terdalam sungai sebagai batas negara. Oleh karena itu Indonesia menolak sistem yang tidak lazim ini dan menginginkan garis batas yang berlaku umum, yaitu garis tengah. Akibatnya wilayah tumpang-tindih yang dipersengketakan akan bertambah luas dari sebelumnya. Walaupun demikian Indonesia bersedia memulai perundingan penetapan batas landas kontinen kedua negara terlepas dari persoalan yang timbul dengan Vietnam Selatan di masa yang lalu.

Perundingan pertama dimulai pada tanggal 5 Juni 1978 yang kemudian disusul oleh perundingan selanjutnya. Walaupun belum menghasilkan suatu persetujuan kemajuan yang dicapai bersama cukup memberi harapan. Dalam perundingan ke-2, Vietnam mengusulkan suatu "harmonized line" (pembagian yang cocok) yang membagi wilayah tumpang-tindih tersebut menjadi 55% untuk Indonesia dan 45% untuk Vietnam. Dengan usul ini wilayah yang dipersengketakan menjadi lebih kecil.

Tetapi Indonesia masih tetap berkeberatan dengan usul ini, karena jika ini disetujui dikhawatirkan hal ini menjadi preseden bagi diterimanya prinsip Thalweg dalam penetapan batas Landas Kontinen. Oleh karena itu masih diperlukan perundingan lanjutan untuk mencapai sepakat kata. Dalam perundingan ke-6 tanggal 11-16 Mei 1981, Vietnam bersedia melepaskan sistem "thalweg"-nya dan Indonesia memberikan konsesi-konsesi tertentu, misalnya kerjasama ekonomi. Tetapi Vietnam menganggap konsesi ini masih kurang, sedangkan Indonesia merasa sudah cukup. Tampaknya dalam perundingan yang baru-baru ini diadakan, belum dicapai titik temu dalam hal ini.

NILAI STRATEGIS PERAIRAN NATUNA

Kekayaan alam berupa minyak dan gas alam yang terkandung di landas kontinen yang terletak di perairan Laut Cina Selatan menyebabkan masalah penentuan batas itu tidak saja menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga mempunyai arti strategis bagi keamanan wilayah Indonesia. Landas Kontinen di perairan Natuna ini mengandung endapan gas alam yang sangat besar, diperkirakan berlipat-ganda besarnya dari endapan yang terdapat di Arun dan Bontang. Untuk memanfaatkan kekayaan alam ini, Indonesia (cq Pertamina) yang belum mempunyai teknologi yang tinggi telah mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak asing baik dalam bentuk bagi hasil maupun kontrak karya. Sekitar tahun 1971-1974 Indonesia telah memberi izin eksplorasi dan eksploitasi kepada beberapa perusahaan minyak asing, yaitu CONOCO (Amerika) dan AGIP (Italia). Pada waktu itu belum ada pendekatan untuk perundingan dengan Vietnam Selatan mengenai penetapan batas landas kontinen kedua negara.

Barulah setelah Republik Sosialis Vietnam (Vietnam dipersatukan) berkuasa, Indonesia memulai perundingan. Walaupun persetujuan bersama belum tercapai, Indonesia tetap melanjutkan eksplorasi dan eksploitasi di perairan Natuna itu. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa Vietnam dalam pernyataan resminya tanggal 29 November 1979 mengemukakan keras Pertamina yang telah mengundang perusahaan-perusahaan minyak asing untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi di perairan yang masih dipersengketakan tersebut.

Kecaman ini tidak ditanggapi oleh Indonesia, dan pada akhir 1979 dan awal 1980, Pertamina telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk eksplorasi dan eksploitasi dengan beberapa perusahaan minyak asing, antara lain Marathon Petroleum Natuna Ltd., Gulf Coy., Amoseas Indonesia, Mobil Oil, Esso Exploration (yang mengambil alih kontrak AGIP), dan Total Natuna. Kegiatan-kegiatan perusahaan minyak asing ini masih dalam tingkat penelitian dan pencarian minyak dan gas alam, kecuali CONOCO yang sudah mulai berproduksi.

Indonesia berpendirian bahwa izin itu diberikan bagi eksplorasi dan eksploitasi dalam wilayah perairan Indonesia, yaitu bagian dalam dari batas garis tengah yang ditetapkannya. Untuk ini Indonesia akan menjamin keamanan dan kepentingan mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di perairan itu.

Melihat perkembangan ini Vietnam lalu mengadakan perjanjian kerjasama dengan Uni Soviet pada bulan Juli 1980 untuk eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen bagian selatan Vietnam. Walaupun tidak dinyatakan jelas

kawasan mana, bukan tidak mungkin perairan Natuna termasuk dalam perjanjian itu. Vietnam pun sangat membutuhkan kekayaan minyak dan gas alam yang sangat potensial di landas kontinen ini.

Dari tindakan yang ditempuh kedua negara ini, jelaslah kepentingan ekonomi telah memperkuat arti strategis dan keamanan perairan Natuna ini. Nilai strategis perairan ini disebabkan letak kawasan Laut Cina Selatan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini merupakan jalur lalu-lintas kapal-kapal negara-negara besar dengan latar belakang kepentingan nasional masing-masing.

Selain itu adanya sumber-sumber konflik yang menyangkut pemilihan pulau-pulau (Spratly, Paracel) dan batas landas kontinen yang masih dipersengketakan oleh Cina, Malaysia, Pilipina, Taiwan dan Vietnam di kawasan ini menyebabkan keamanannya makin rawan. Konflik tertentu dapat terjadi jika salah satu pihak menggunakan tindakan kekerasan dalam sengketa itu yang ditanggapi dengan kekerasan pula oleh pihak lainnya. Turut campurnya negara-negara besar untuk membela kepentingan mereka akan makin memperumit konflik yang terjadi.

Oleh karena itu wajarlah jika Indonesia memusatkan perhatian pada kawasan ini, terlebih-lebih dengan adanya tindakan-tindakan Vietnam yang dianggapnya cukup provokatif dan menyadarkan Indonesia untuk bersikap waspada. Vietnam tidak saja menuntut Pulau Natuna, mengecam izin eksplorasi yang diberikan Indonesia kepada beberapa perusahaan minyak asing dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Uni Soviet, tetapi juga mengintai dan membayangi kawasan minyak lepas pantai Natuna dengan pesawat-pesawat tempur.

Untuk menghadapi itu semua, Indonesia telah meningkatkan pembangunan di Pulau Natuna, terutama dengan dibangunnya landasan kapal terbang yang dapat didarati oleh hampir semua tipe pesawat sipil dan militer yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu Indonesia telah mengadakan latihan gabungan ABRI di perairan Natuna ini.

KESIMPULAN

Ketidakjelasan batas-batas negara baik di perairan maupun di dasar laut akan selalu merupakan benih konflik yang harus segera diatasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Indonesia telah menyelesaikan sebagian besar perundingan batas-batas negaranya dengan negara-negara tetangga dengan baik, terutama dalam memperkuat posisi Wawasan Nusantara. Indonesia pun menginginkan hal yang sama dengan Vietnam, terlebih jika mengingat posisi Natuna yang strategis bagi keamanan Indonesia.

Bagi Vietnam, masalah penetapan batas wilayah dengan negara-negara tetangganya masih cukup banyak dan rumit yang semuanya merupakan benih-benih konflik, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Penyelesaian konflik Kamboja dengan cara tidak damai (kekuatan militer) menimbulkan kewaspadaan negara-negara tetangganya terhadap tingkah laku Vietnam itu baik di kawasan Asia Tenggara umumnya maupun Laut Cina Selatan khususnya. Demikian pula adanya hubungan dekat Vietnam dengan Uni Soviet makin memperkuat kewaspadaan tersebut.

Oleh karena itu, tercapainya persetujuan bersama penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Vietnam lebih penting lagi bagi Vietnam demi citranya di kawasan Asia Tenggara dalam arti bahwa Vietnam dapat bersikap luwes dan penyelesaian konflik dengan cara damai. Hal itu dapat pula menjadi preseden bagi penyelesaian persengketaan teritorial lainnya dengan negara-negara yang bersangkutan. Citra semacam itu penting bagi prospek penyelesaian masalah Kampuchea dan peningkatan hubungan baiknya dengan negara-negara ASEAN.